
GEREJA-GEREJA DI PAPUA: MENJADI NABI DI TANAH SENDIRI?

*Makalah seminar pada kuliah perpisahan Dr. At. Ipenburg
STT I.S. Kijne, Abepura, 30 Maret 2002*

Oleh

J. Budi Hernawan ofm

Sekretariat Keadilan dan Perdamaian
Keuskupan Jayapura

Jayapura, Maret 2002

Extraordinarily, God the omnipotent One depends on us – puny, fragile, vulnerable as we may be, to accomplish His purposes for good, for justice, for forgiveness and healing and wholeness. (Desmond Tutu, Afrika Selatan)

Pengantar

Sejumlah ahli politik mengatakan bahwa millenium ketiga sebenarnya baru mulai saat gedung WTC di New York dihancurkan secara mengerikan pada tanggal 11 September 2001 dan penyerbuan Amerika Serikat ke negara Afganistan. Peristiwa dahsyat tersebut telah mengubah peta sosial, politik, ekonomi, budaya, termasuk juga agama-agama. Dua peristiwa penggunaan kekerasan secara luar biasa tersebut seakan-akan telah menjadi pengesahan penggunaan kekerasan demi penghapusan terorisme atau kejahatan di muka bumi. Dengan paham yang disebarluaskan dalam tragedi WTC dan penyerbuan AS ke Afganistan, agama-agama besar dunia sebagai pewaris misi kemanusiaan universal yang menolak penggunaan kekerasan mendapatkan tantangan serius¹. Secara regional dan lokal, tantangan terhadap kemanusiaan tersebut terus diguncang misalnya dengan kekerasan di India 27 Februari 2002 sebagai dampak konflik antarumat beragama Islam dengan Hindu yang telah berusia 500 tahun², perang antar agama di Ambon yang sejak 1997 telah memakan ribuan korban dan belum juga berakhir meski telah tercapai kesepakatan damai di Malino 11-12 Februari 2002, belum lagi perang antaragama di Poso.

Suasana global tersebut mau tidak mau mempengaruhi misi kemanusiaan gereja-gereja di Papua sebagai bagian dari salah satu agama besar di dunia. Apakah gereja-gereja Papua masih memperjuangkan visi kemanusiaan universal? Apakah gereja-gereja di Papua masih mampu memperjuangkannya tanpa kekerasan? Atau dengan kata lain apakah gereja-gereja di Papua sungguh menjadi nabi dalam konteks sosial, ekonomi, kebudayaan, politik di Papua dalam millenium ketiga? Pertanyaan kunci ini menjadi titik tolak refleksi dan analisis teologis kami yang akan dibagi menjadi tiga bagian besar: [1] kenyataan dewasa ini di Papua, dan [2] bagaimana gereja-gereja di Papua dapat menjadi nabi di tanahnya sendiri, dan [3] tawaran langkah-langkah.

1. Kenyataan dewasa ini di Papua

Papua dewasa ini tidaklah sama dengan Papua saat para perintis gereja-gereja, seperti Otto dan Geisler, memasuki Tanah Papua akhir abad XIX (5 Februari 1855). Papua waktu itu belum masuk dalam jaringan global perdagangan, percaturan politik, interaksi sosial, interaksi kebudayaan, dan lalu lintas informasi cyber yang begitu rumit seperti sekarang ini. Karena itu kedudukan gereja-gereja di Papua sekarang perlu dilihat dalam konteks perubahan global tersebut.

¹ Perjuangan penegakan HAM di dunia juga mengalami guncangan hebat karena peristiwa tragis dan serangan ke Afganistan. *Lihat* tulisan Michael Ignatieff, "Is the Human Rights Era Ending?" dalam: *The New York Times*, February 5, 20002. Amerika Serikat berhasil mempengaruhi negara-negara dunia untuk mengeluarkan produk hukum anti-terorisme yang senyatanya di banyak negara dipakai untuk melakukan represi terhadap gerakan-gerakan perjuangan HAM dan pro-demokrasi. AS juga menyediakan dana milyaran dollar untuk membiayai kemampuan militer negara-negara yang dinilai penting, termasuk Indonesia. *Lihat* Wawancara Philip Reeker, Wakil Juru Bicara Kementrian Dalam Negeri AS dengan Federal News Service, 20 Maret, 2002.

² *Lihat* "Killing Thy Neighbor", dalam: *TIME*, March 11, 2002.

a. *Membaca kembali sejarah gereja*

Jika kita berani membaca kembali sejarah penginjilan gereja-gereja manapun di Papua ini dalam visi kemanusiaan yang lintas agama dan budaya, kita barangkali akan menemukan penilaian dan kesimpulan baru atas fakta-fakta historis yang sudah kita kenal dan diterima begitu saja sebagai kebenaran.

Gereja-gereja Papua de facto telah membawa masyarakat Papua masuk dalam zaman baru dengan adanya pendidikan formal, pembukaan daerah-daerah terisolir (terutama di wilayah pegunungan), pelayanan kesehatan, pendidikan kaum perempuan, pelatihan pertukangan dan pertanian, pelayanan transportasi ke wilayah pedalaman, juga penelitian kebudayaan yang diakui di tingkat universitas dunia. Semua usaha awal untuk pemberdayaan masyarakat ini telah meletakkan dasar struktural bagi pengembangan masyarakat Papua selanjutnya. Jasa-jasa ini kiranya telah tertanam dalam ingatan bangsa Papua³.

Di sisi lain, gereja-gereja perlu merefleksikan ulang sejumlah segi dalam sejarah penginjilannya khususnya konflik-konflik yang muncul pada proses penginjilan itu. Misalnya gesekan antara Misi Katolik dan Zending saat penginjilan di Mimika dan Merauke tahun 1930 yang berawal dari pembagian wilayah penginjilan oleh Pemerintah Belanda dimana wilayah Mimika termasuk daerah Misi dan tiba-tiba Zending masuk sehingga muncul ketegangan yang hebat hingga pemerintah Belanda harus menangani secara hukum⁴. Hal senada terjadi juga di lembah Ilaga tahun 1960-an dimana terjadi ketegangan antara CAMA dengan misi juga soal wilayah penginjilan⁵.

Dari sekelumit fakta-fakta historis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa masuknya gereja-gereja ke Papua membawa dua dimensi sekaligus: kemajuan tapi juga persaingan, kabar gembira tapi juga konflik, pemberdayaan masyarakat sekaligus penanaman ghetto keagamaan. Semua itu bagian dari sejarah yang perlu diangkat sebagai bagian dari jatidiri gereja-gereja di Papua bukan dengan maksud saling menyalahkan melainkan justru sebagai upaya rekonsiliasi di antara gereja-gereja sendiri.

b. *Kebijakan negara terhadap Papua*

Ketidakadilan struktural yang dihadapi oleh bangsa Papua selama puluhan tahun telah menjadikan bangsa Papua sebagai masyarakat yang menyimpan ingatan penderitaan sebangsa (*memoria passionis*)⁶. Unsur-unsurnya:

³ Banyak kepustakaan tersedia dalam hal ini seperti *Sejarah Gereja Katolik di Irian Selatan*, Merauke: Keuskupan Agung Merauke, 1999 yang menguraikan perkembangan misi katolik di wilayah selatan atau Pim Schoorl, *Belanda di Irian Jaya*, Jakarta: KBG, 2000; tulisan-tulisan bercorak kisah mengenai penginjilan CAMA di Ilaga, Beoga, Gibbons, *The People Time Forgot*, Chicago: Moody Press, 1981; penginjilan di wilayah orang Sawi (Papua Selatan) Don Richardson, *Peace Child*, California: G/L Publication, 1974.

⁴ *Sejarah Gereja Katolik di Irian Selatan*, Merauke: Keuskupan Agung Merauke, 1999, hlm. 37-41.

⁵ A. van Nunen ofm, "Dua Puluh Lima Tahun Gereja Katolik di Ilaga", dalam: TIFA JAYA, no. 221, Agustus 1996.

⁶ Uraian mengenai arti *memoria passionis* dan fakta-fakta yang dianalisis dalam tahun 1999 dan 2000, dapat dibaca dalam terbitan SKP, *Memoria Passionis di Papua: Gambaran Tahun 1999*,

❖ kebijakan pembangunan yang tidak manusiawi
Dalam pemerintahan Orde Baru, kebijakan pembangunan bersifat sentralistik untuk seluruh Indonesia. Bagi Papua kebijakan tersebut telah menghisap kekayaan alam tanpa pengembangan SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Pada umumnya industri yang berkembang di Papua bersifat ekstraktif dan belum sampai pada tingkat produsen. Selain itu pendapatan pembangunan lebih banyak dinikmati oleh birokrasi bahkan pada saat penyusunan RABD zaman Otonomi khusus ini.

❖ pelanggaran berat HAM
Dari dokumentasi kalangan gereja-gereja dan kalangan LSM, dapat dilihat bahwa telah terjadi kebijakan negara yang represif dan militeristik terhadap pengungkapan aspirasi masyarakat yang mengakibatkan **tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan** di Papua. Hal ini bukanlah tafsiran awam melainkan kesimpulan resmi dari KPP HAM Papua saat menyelidiki peristiwa Abepura 7 Desember 2000. Kasus Abepura merupakan contoh kasus pola kekerasan yang dilakukan oleh negara terhadap masyarakat. Pola tersebut tetap berulang (lihat lampiran) hingga akhir tahun 2001 dengan penculikan dan pembunuhan Ketua Presidium Dewan Papua, Theys Hiyo Eluay⁷.

❖ identitas Papua ditabukan
Sejak pembentukan kabupaten dan provinsi Irian Barat dengan UU No. 12/1969, bangsa Papua diwajibkan memakai nama Irian untuk dirinya. Nama 'Papua' ditabukan dan seluruh kebudayaan Papua oleh pemerintah begitu saja disamakan dengan gerakan OPM; padahal kebudayaan bermakna luas meliputi tata kepemimpinan asli, arsitektur, filsafat hidup, sistem pendidikan dan pembelajaran dalam keluarga, sampai dengan ungkapan kesenian seperti tarian, lagu, ukiran. Dengan tindakan represif di bidang kebudayaan, masyarakat Papua digerogeti akar-akar jatidirinya hingga mengalami krisis jatidiri⁸. Bahkan seniman Papua, Arnold Ap dengan kelompoknya Mambesak, mengalami penculikan dan pembunuhan karena dinilai membahayakan negara dengan membangkitkan jatidiri bangsa Papua melalui tari, nyanyian⁹. Represi di tataran budaya ini menjadikan masyarakat terbelah dan masing-masing terkurung dalam prasangka negatif masing-masing.

c. Menghadapi upaya politisasi agama

Segi struktural lain yang penting dianalisis adalah hubungan antara agama dengan negara dalam era otonomisasi daerah. Kedudukan agama menjadi makin strategis dan vital dalam percaturan politik Indonesia. Agama terkait dengan massa yang terikat tidak hanya secara organisatoris tetapi secara psiko-religius. Karenanya partai-partai berbasis agama muncul kembali dalam Pemilu 1999 dan coba untuk meraih suara lebih besar pada Pemilu 2004. Dalam kerangka otonomisasi daerah, peran agama juga makin luas karena dapat dipergunakan sebagai klaim identitas

Jakarta: SKP Keuskupan Jayapura dan LSPP, 2000; dan *Memoria Passionis di Papua: Gambaran Tahun 2000*, Jakarta: SKP Keuskupan Jayapura dan LSPP, 2001

⁷ Contoh dokumentasi kasus-kasus pelanggaran berat HAM dapat dilihat dalam tulisan Robin Osborne, *Kibaran Sampari*, Jakarta: ELSAM, 2001.

⁸ Lihat tulisan dalam tabloid *JUBI*, No. 27 th. III, 1-7 Februari 2002, "Kaburnya Identitas Papua"

⁹ George J. Aditjondro, *Cahaya Bintang Kejora*, Jakarta: ELSAM, 2000, hlm. 138-153.

daerah seperti Nangroe Aceh Darussalam. Penggunaan simbol-simbol agama, bahkan ajaran agama, dalam dunia politik cenderung makin kuat. Hal yang senada juga terjadi dalam gerakan aspirasi M di Papua yang banyak menggunakan simbol-simbol agama kristen. Yang buruk adalah bahwa agama dijadikan dasar untuk berperang seperti terjadi di Maluku, Maluku Utara, Poso.

d. Menganalisis mutu hidup manusia di Papua

Dewasa ini Gereja-gereja Papua menghadapi situasi yang amat berbeda. Ada sejumlah segi mendasar yang dihadapi sebagai tantangan amat serius oleh Gereja-gereja yang mengemban misi perdamaian dan keadilan injili.

❖ penyakit HIV/AIDS yang mewabah hingga menduduki tempat kedua terbesar di Indonesia

Kurang disadari bahwa di Papua, penyakit HIV/AIDS telah sungguh mengancam mutu hidup keluarga-keluarga Papua. Data dari Dinas Kesehatan Propinsi Papua per 28 Februari 2002 mencatat bahwa sekurang-kurangnya terdapat 822 orang di Papua menderita penyakit HIV/AIDS. Yang mengejutkan sekaligus memprihatinkan adalah bahwa sudah ada **2 orang bayi** (di bawah 1 th) dan 4 orang (1-4 th) yang dilaporkan mengidap penyakit AIDS. Itu berarti sudah ada ibu hamil yang mendapatkan penyakit AIDS dari suaminya. Dan ada **4 anak** yang tumbuh dengan penyakit AIDS. (Data 31 Desember 2001 mencatat 818 orang. Berarti dalam dua bulan sudah ada kenaikan 4 orang).

Tabel 2. Angka kumulatif penderita HIV dan AIDS per kabupaten

Kabupaten	HIV	AIDS	Jumlah
Jayapura	15	22	37
Biak	6	0	6
Serui	1	0	1
Nabire	12	25	37
Manokwari	3	0	3
Fak-fak/Kaimana	30	1	31
Mimika	223	41	264
Sorong	52	1	53
Merauke	150	177	327
Jayawijaya	8	0	8
Kota Jayapura	25	30	55
Total	525	293	822

Tabel 3. Jumlah penderita AIDS dan angka kematian

Kabupaten	AIDS	Angka kematian
Jayapura	22	4
Biak	0	0
Serui	0	0
Nabire	25	9
Manokwari	0	0
Fak-fak/Kaimana	1	0
Mimika	41	14
Sorong	1	1

Merauke	177	98
Jayawijaya	0	0
Kota Jayapura	30	17
Total	297	143

Data-data di atas hanyalah sebagian cermin dari kenyataan yang lebih luas daripada yang bisa dijangkau oleh instansi kesehatan pemda. Tetapi lebih dari itu, data-data tersebut menjadi mercu suar mutu hidup, penghayatan nilai, dan daya tahan keluarga-keluarga kita di Papua ini.

- ❖ kesadaran hukum merosot:
 Dalam empat tahun terakhir seiring dengan era reformasi, kesadaran hukum tampaknya merosot dengan indikasi meningkatnya kasus-kasus kriminalitas yang dilaporkan dalam mass media seperti perkosaan yang dilakukan oleh sekelompok pelajar¹⁰. Kemabukan yang dengan mudah ditemukan di berbagai tempat di kawasan perkotaan dan tidak jarang melibatkan oknum pejabat pemerintah, polisi, atau TNI. Sengketa-sengketa atas tanah makin rumit seperti kasus bekas gedung DPRD Kabupaten Jayapura dan cara 'pemalangan' makin biasa dilakukan¹¹. Juga masalah narkoba yang melanda kelompok muda usia Papua.
- ❖ mutu pendidikan merosot:
 Bukan rahasia lagi bahwa pendidikan dasar kita semakin merosot karena sejumlah faktor: [1] kekerasan sosial-politik seperti terjadi di Wamena, 6 Oktober 2000, di Wasior Juni 2001, atau di Ilaga 28 September 2001 yang mengakibatkan lumpuhnya pendidikan di wilayah tersebut, [2] mutu dan dedikasi guru-guru menurun khususnya di luar perkotaan, [3] fasilitas pendidikan kurang memadai, [4] kesadaran orang tua murid terhadap pendidikan anak menurun yang berdampak pada kemerosotan keinginan belajar pada anak-anak.

2. *shālôm* dan sikap anti-kekerasan: sebuah refleksi teologis

Jika kenyataan yang digambarkan secara singkat di atas dikonfrontasikan dengan nilai-nilai alkitabiah, maka dapat ditarik suatu refleksi teologis. Saya mengambil titik pijakan pada kisah Penciptaan (Kej 1,1-2,4) yang akan dilanjutkan dengan kisah nabi-nabi dan akhirnya hidup dan karya Yesus sendiri¹².

Dalam penciptaan terdapat keadaan asali, yakni damai/ *shālôm* yang dinyatakan dalam hubungan antar semua makhluk yang rukun, bersahabat, dan semua makan tumbuhan (ay. 30). Berkali-kali ditegaskan bahwa yang diciptakan itu baik dan khusus untuk manusia dikatakan sungguh amat baik (Kej 1,4.10.12.18.25. 31). Dengan demikian digambarkan apa arti '*shālôm*' itu, yakni kepenuhan hidup, kesejahteraan dalam hidup

¹⁰ Misalnya kasus perkosaan yang dilaporkan oleh *Papua Pos*, tgl. 26 Maret 2002

¹¹ Dalam kasus sengketa tanah, harus dibedakan secara tajam antara hak atas tanah (adat) dan hak milik atas bangunan, perabot, dsb. Boleh jadi tanah dimiliki oleh seseorang atau suatu instansi secara tidak sah, tetapi hal ini tidak dapat membenarkan perampasan atas hak milik dengan cara pemalangan. *Lihat* misalnya, pasal 36 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹² Refleksi ini berinspirasi pada karangan Tisera, G., *Komunitas Basis Pembawa Damai*, Jakarta: Lembaga Biblika Indonesia, 2001.

harian, hidup bersahabat dengan seluruh makhluk dan alam ciptaan, hubungan yang baik antar manusia dan Sang Pencipta¹³. Keadaan damai/ *shālôm* itu berciri integral, rohani dan jasmani, berdimensi pribadi, sosial dan kosmis.

Keadaan yang damai tersebut selain merupakan pemberian gratis dari Allah tetapi juga diserahkan oleh Allah kepada manusia untuk ditangani dan dipelihara lebih lanjut. Allah memberikan dua syarat: [1] *mengusahakan dan memelihara taman* (Kej. 2,15) dan [2] mewujudkan situasi ideal itu berdasarkan perangkat nilai Allah sendiri *janganlah kaumakan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati* (ay. 16-17). Jelas ditegaskan oleh Allah bahwa manusia hanya dapat bertahan dalam keadaan damai jika mengikuti cara hidup dan pedoman yang ditetapkan oleh Allah. Jika tidak, risikonya amat nyata dan hebat: **kematian**.

Ternyata manusia tidak mampu memenuhi syarat kedua yang berisiko amat besar itu. Manusia menolak untuk taat kepada Allah. Manusia memilih untuk mengikuti kehendaknya sendiri. Oleh penulis kitab kejadian, tindakan ini dikategorikan sebagai akar kejahatan manusia yang menjadi sumber segala kekerasan. Kitab kejadian bab 3 melukiskan bagaimana keadaan damai berubah total dan seketika, yang dalam bahasa alkitab disebut dengan 'dosa'. Dengan berdosa, manusia menghindari hubungan dengan Allah (ay. 8-10), mengkambing hitamkan Allah dan sesamanya (ay. 12-13), menginjak makhluk lain (ay. 16.20) dan dikecewakan oleh bumi yang digarap dengan kekerasan (ay. 17-19). Pada akhirnya manusia bertemu kembali dengan dirinya yang sendirian, kesepian, dan miskin. Inilah titik balik sejarah manusia menjadi sejarah meluasnya kekerasan¹⁴.

Sejak itu kekerasan melanda umat manusia: membunuh adik sendiri, Habel, (kej 4,1-8). Dalam diri Lamekh, kekerasan menjadi liar dan membabi buta (Kej 7,17-24). Kekerasan (*hāmās*) akhirnya mencapai dimensi universal dan merusak bumi yang diciptakan Allah (Kej 6,11). Akar kekerasan manusia adalah hati manusia dan segala kecenderungannya yang membuahkan kejahatan (raah) belaka (Kej 6,5). Penulis kitab kejadian merumuskan kekerasan (hamas) sebagai pelanggaran atas hak sesama, penghilangan hak hidup secara paksa, setiap tingkah laku asosial yang melawan HAM dan keadilan. Hamas praktis mencakup segala unsur dosa. Situasi ini tidak bisa dibiarkan oleh Allah sehingga didatangkannya air bah untuk mengubah wajah dunia yang jahat (Kej 7,11). Dunia dikembalikan ke situasi *shālôm*.

Paham damai dalam penciptaan tersebut menjadi titik acuan para nabi saat mereka berhadapan dengan bangsa Israel yang terbelah dua, mengalami krisis sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan, bahkan pengasingan. Para nabi, terutama Yesaya, menghadapi masyarakat Israel yang telah menjadi 'sisa kecil' yang tidak hanya dalam arti jumlah tetapi juga kadar jatidiri. Karena itulah Yesayaewartakan jalan damai, rekonsiliasi dan *peacebuilding*. Visi damai para nabi tersebut dirangkum oleh Guido Tisera sbb:

¹³ *shālôm* selalu bermakna religius yang tinggi. Kata itu bermakna lebih luas daripada 'damai' (peace, *eirēnē*) melainkan mencakup keutuhan hidup, kesatuan dengan Allah, relasi yang baik dengan semua makhluk. Lihat penjelasan dalam Kittel, Gerhard, and Friedrich, Gerhard, Editors, *The Theological Dictionary of the New Testament, Abridged in One Volume*, (Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company) 1985.

¹⁴ *Op.cit.*, hlm. 7.

Damai berarti harmoni manusia dengan Allah, dengan manusia, dengan ciptaan, atau kembali ke situasi awal (motif penciptaan). Hal ini berarti pembebasan dari perbudakan atau penjajahan (motif eksodus). Dasar kokoh bagi damai ialah keadilan dan kebenaran (sedaqah), khususnya bagi kaum tertindas atau tersisih. Damai juga bersifat ekumenis dan universal, persatuan dan kebersamaan bangsa-bangsa di Sion, Yerusalem baru. Damai perlu dibayar mahal dengan korban tulus. Damai adalah pemberian Allah yang mengadakan keterlibatan manusia. Mentalitas perang dan kekerasan, cara-cara kekerasan untuk menyelesaikan masalah harus segera diakhiri. Gaya hidup konsumtif dan kapitalistis, digantikan gaya hidup ughari, solidaritas antarmanusia dan belas kasih terhadap alam¹⁵.

Para nabi mewartakan damai dalam situasi serba krisis, dimana-mana kejahatan menguasai masyarakat, kemiskinan menjerat mayoritas masyarakat. Pengalaman iman orang Yahudi kemudian menghasilkan refleksi mengenai sosok Hamba Yahweh (Yes 52,13 – 53,12). Sosok manusia tak dikenal yang dengan sadar, berani, dan rela menanggung segala derita akibat kejahatan dan kekerasan manusia demi pemulihan hubungan manusia dengan Allah. Refleksi ini kemudian dikenakan pada diri Yesus, orang Nazaret.

Yesus lahir dalam suasana masyarakat Yahudi yang sedang dijajah. Sejak lahir dia sudah diancam oleh kejahatan dan kekerasan dalam diri Herodes (Mat 2,16). Dia harus ikut mengungsi ke Mesir bersama Yusuf dan Maria. Dalam masa penampilannya di muka umum, dia mengalami banyak pertentangan dengan kaum Saduki, Farisi, imam-imam kepala, bahkan rakyatnya sendiri (Luk 4, 22.24). Yesus dikorbankan oleh muridnya sendiri, Yudas Iskariot, dengan ciumannya (Mat 26,48-49, Mrk 14,44-45). Yesus ditinggalkan oleh kelompok inti yang telah lama dikaderkan. Ditolak oleh seluruh bangsa-nya di hadapan Pilatus yang lebih memilih Barabas, residivis kelas kakap. Berhadapan dengan itu semua Yesus buat apa? Apakah ia melawan dengan kekerasan? Apakah ia mengutuki bangsanya atau orang yang mengkhianati dia? Apakah ia memimpin gerakan perlawanan bawah tanah? Marilah kita lihat dalam perjalanan hidup Yesus.

Dalam permulaan pelayanan-Nya di muka umum seperti dicatat oleh Lukas, Yesus menyatakan program kerjanya (Luk 4,12-21) tetapi masyarakat kampungnya menolaknya mentah-mentah (ay. 23) bahkan menghalau Yesus dan hendak melemparkan ke tebing (ay. 29). Tetapi Yesus tidak melawan, berontak melainkan *lewat di tengah-tengah mereka lalu pergi* (ay. 30). Catatan Matius juga menggambarkan hal serupa dengan kisah kotbah di bukit (Mat 5-7). Yesus menguraikan visi masyarakat yang baru dengan meninggalkan kekerasan (Mat 5,39-42), tidak balas dendam bahkan mengasihi musuh (5, 43-48)¹⁶. Gagasan ini betul radikal dan merupakan terobosan sehingga para ahli tafsir meyakini bahwa hal semacam ini asli dari Yesus dan bukan dari jemaat perdana¹⁷.

¹⁵ *Op.cit.*, hlm. 25.

¹⁶ *Op.cit.*, hlm. 32.

¹⁷ Lihat pedoman penelitian yang dilakukan oleh kelompok *The Jesus Seminar* untuk mencari Yesus Historis yang mengatakan a.l. [1] perkataan dan perumpamaan Yesus yang asli menerobos akar sosial dan religius; [2] bersifat mengejutkan dan mengguncangkan karena menuntut sikap yang bertolak belakang dari apa yang biasa dijumpai dalam hidup harian, [3] perkataan keras seringkali diperhalus dalam proses penurunan karena disesuaikan dengan

Yesus juga menolak penggunaan kekerasan untuk mendatangkan Kerajaan Allah. *“Pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu”* (Mat 20,25-26). Pada saat mengutus murid-muridnya pergi berdua-dua untuk mewartakan kerajaan Allah, Yesus menginstruksikan dengan amat terperinci bahwa para murid tidak boleh membawa beka apa-apa dalam perjalanan, *“Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau dua helai baju”* (Luk 9,3 bdk. Mat 10,10 yang menambahkan ‘kasut’). Kita tahu bahwa dalam konteks Palestina zaman itu, tongkat tidak hanya berarti penyangga badan tetapi juga alat bela diri terhadap musuh atau binatang buas. Berjalan tanpa kasut memustahilkan orang menghindari bahaya secara cepat. Karena itu tanpa tongkat dan kasut, seseorang tidak akan dapat membela diri, menggunakan kekerasan. Dengan kata lain, para murid diutus dengan cara dan membawa gaya hidup *non-violence*.

Puncak dari sikap damai, anti-kekerasan, berpegang pada kebenaran demi kerajaan Allah tampak dalam hari-hari penderitaan Yesus yang dicatat dengan amat rinci oleh keempat Injil. Saat Petrus hendak melawan prajurit-prajurit Imam Agung dengan pedang, Yesus mengatakan, *“Sarungkanlah pedangmu. Barangsiapa menggunakan pedang, akan binasa oleh pedang”*. Saat Yesus ditolak oleh seluruh bangsa di hadapan Pilatus dan dinilai lebih rendah daripada Barabas, residivis kelas kakap, dia diam seribu bahasa (Mat 27,21-25). Saat orang menghujat Yesus di kayu salib, dia justru memohon kepada Bapa, *“Ya, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat”* (Luk 23,34). Pada saat-saat kritisnya, dia juga mengampuni perampok yang disalibkan bersamanya (Luk 23,43). Nada damai (*shālôm*) tersebut tetap bergema dan menjadi sapaan khas yang diucapkan Yesus sesudah bangkit, *“Damai sejahtera bagimu”* (Luk 24,36), *“Salam bagimu”* (Mat 28,9), *“Damai sejahtera bagi kamu”* (Yoh 20,19.21).

Jelaslah bahwa seluruh hidup, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus membawa gaya hidup baru yang bercirikan damai, anti-kekerasan, kebenaran, dan keterarahan radikal kepada Allah. Hamba Yahweh telah digenapi dalam diri Yesus secara sempurna. Karena itu, Yesus memulihkan hubungan manusia dengan Allah yang sudah rusak karena sejarah kekerasan akibat dosa manusia. Yesus menjadi lambang rekonsiliasi sejati yang melingkupi seluruh semesta alam (Kol 1,19-20).

3. Menjadi nabi di tanah sendiri

Setelah menganalisis kenyataan sosial, politik, budaya di Papua ini dan mengkonfrontasikannya dengan pesan alkitab, jelaslah bahwa terdapat sejumlah kesimpulan yang penting digarisbawahi. *Pertama*, Papua makin jauh dari suasana *shālôm* karena warisan sejarah penginjilan kita sendiri, ketidakadilan struktural, politisasi agama, kemerosotan mutu hidup manusia. *Kedua*, kekerasan makin dihalalkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. *Ketiga*, panggilan alkitabiah untuk mewartakan *shālôm* tetap menjadi panggilan gereja-gereja.

Kita semua, gereja-gereja di Papua, diutus Yesus untuk mewartakan gaya hidup damai, anti-kekerasan tadi (Mat 28,20). Kita mendapat tantangan serius seperti Yesus karena kita menawarkan gaya hidup yang ‘melawan arus’ di zaman manapun. Seperti Yesus,

keadaan setempat. *The Five Gospels, The Search for the authentic words of Jesus*, New York: Macmillan Publishing Co, 1993, hlm. 16-33.

tantangan terbesar justru datang dari dalam diri kita sendiri: sejarah masa lampau, gaya hidup yang tidak kristen, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, selain tantangan dari luar yang tidak kalah sulit.

Untuk mewujudkan gaya hidup Yesus damai, anti kekerasan, menegakkan keadilan, kami tawarkan sejumlah pikiran berikut sekaligus menutup uraian ini.

❖ **Membangun ‘budaya damai’ dan ‘anti kekerasan’:**

Pentinglah bagi kita untuk betul memahami secara menyeluruh gaya hidup damai dan anti kekerasan yang sudah diteladankan oleh Yesus sendiri¹⁸. Pengertian itu perlu digali, diresapkan, dan diaktualisasikan dalam berbagai lapisan masyarakat seperti sekolah-sekolah, lembaga-lembaga adat, kelompok-kelompok profesi, kelompok-kelompok politik agar harkat kemanusiaan kita tidak diperalat demi kepentingan manapun. Penghayatan atas nilai dasar damai dan anti-kekerasan makin mendapat tantangan luarbiasa baik secara global dengan atmosfer perang melawan terorisme maupun secara nasional dengan konflik bersenjata yang makin dianggap lumrah. Bagaimanakah upaya gereja-gereja di Papua menghidupkan dan menyuarakan dengan tegas nilai dasar alkitabiah tersebut sebagai nilai tertinggi di atas segala kepentingan?

❖ **Mengembangkan dialog antaragama dan antarbudaya:**

Dalam upaya membangun budaya damai, amatlah penting kita mengadakan dialog antaragama dan antarbudaya. Langkah ini amat penting untuk memperluas pemahaman kita terhadap ‘yang lain’ sehingga perbedaan tidak lagi dinilai dan dihayati sebagai ancaman melainkan sebagai fakta dunia ciptaan yang perlu saling melengkapi. Dialog tersebut tidak hanya terbatas pada kegiatan ilmiah tetapi dapat dikembangkan dengan program kegiatan berkelanjutan yang menyentuh tingkat akar rumput. Misalnya program *live-in* di sekolah-sekolah menengah untuk pertukaran pelajar Papua dengan non-Papua agar masing-masing pihak mengalami seluruh dimensi hidup masing-masing. Program kuliah hubungan antaragama di STT/STFT yang diselenggarakan bersama antar berbagai agama, khususnya agama Islam, Budha, Hindu, agar pemahaman para pelayan umat cukup lengkap dan mampu memahami perbedaan teologis maupun praktis secara sehat, dewasa, dan manusiawi. Apakah kita sudah berani mengambil langkah terobosan untuk melewati batas-batas budaya, agama, warisan sejarah dengan semangat rekonsiliasi alkitabiah?

❖ **Menegakkan keadilan dan kebenaran:**

Berdasarkan teladan dan ajaran Yesus Kristus, penegakan keadilan dan kebenaran merupakan panggilan hakiki dari gereja-gereja. Karenanya, panggilan itu tidak bisa diserahkan kepada kalangan LSM. Kalangan LSM –yang tentu amat berjasa dalam upaya penegakan keadilan—merupakan pihak yang menangani aspek teknis sedangkan perjuangan yang bersifat visioner tidak dapat dialihkan pada pihak manapun jika gereja masih hendak mengklaim sebagai pembawa warta Kristus. Inilah salah satu segi fundamental dalam profetisme gereja. Karena itu tidak mengherankan jika gereja-gereja di Papua kerap kali mengeluarkan laporan atau surat terbuka untuk menanggapi situasi sosio-politik di Papua; bahkan mendirikan badan pelayanan umat yang secara khusus menangani persoalan hak asasi

¹⁸ Brian Starcken CSSP dan Robert Schreiter CPPS, *Rekonsiliasi*, Jakarta: LPPS KWI dan Komisi PSE-KWI, 2002, hlm. 28-32.

manusia dan rekonsiliasi seperti Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) di Keuskupan Jayapura, Merauke, dan Agats; Biro Keadilan dan Perdamaian dalam Sinode GKII; Biro Hukum dan HAM dalam Sinode GKI di Tanah Papua. Pelayanan khas gerejawi tersebut amat penting guna menyuarakan suara kenabian dalam tingkat praksis sosio-politik. Oleh karenanya kita perlu bertanya sejauh mana pelayanan tersebut telah dibekali dengan SDM yang visioner, profesional, dan purnawaktu? Juga bagaimana badan-badan pelayanan tersebut dapat bekerjasama secara efektif?¹⁹

❖ **Mengevaluasi proyek-proyek bersama:**

Gereja-gereja sudah memprakarsai sejumlah proyek bersama di sejumlah bidang pelayanan masyarakat: **bidang kesehatan** dengan Yayasan Bethesda, **bidang pendidikan** dengan sekolah SMU gabungan, **bidang pengembangan masyarakat desa** dengan YPMD, **bidang pendidikan hukum** dengan LBH Jayapura, **bidang pendidikan dan perjuangan HAM** dengan ELSHAM Papua. Tinggal sebuah pertanyaan sejauh mana proyek-proyek bersama tersebut mewujudkan suara kenabian gereja di berbagai bidang kehidupan nyata dalam masyarakat. Apakah pelayanan-pelayanan tersebut memiliki nilai lebih dibandingkan pelayanan negeri/pemerintah? Sejauh mana gereja-gereja ambil langkah serius untuk memajukan prakarsa-prakarsa terobosan itu di masa mendatang?

❖ **Kritis terhadap politisasi agama**

Gereja-gereja kiranya perlu tetap dan makin kritis dengan upaya politisasi agama. Ruang untuk itu amat terbuka dengan kecenderungan global dan suasana otonomisasi daerah²⁰, termasuk Otsus. Dengan UU No. 21/2001 tentang Otonomi khusus Papua, kalangan agama-agama mendapat peluang untuk ambil bagian dalam MRP. Peluang ini wajar dalam sistem demokrasi dimana setiap pihak dalam masyarakat memiliki hak untuk ambil bagian dalam pemerintahan. Namun demikian, gereja-gereja perlu waspada karena bidang yang dimasuki adalah murni bidang kekuasaan praktis. Gereja-gereja perlu bertanya bagaimana suara kenabian dapat ditampung dalam kerangka politik praktis? Bagaimana gereja-gereja dapat terhindar dari upaya politisasi agama sekaligus tetap hadir sebagai nabi dalam dunia politik?

❖ **Meningkatkan mutu hidup**

Dari paparan fakta mengenai peningkatan kriminalitas dan penyebaran penyakit HIV/AIDS, kiranya kita perlu bertanya dengan serius bagaimana pastoral terhadap jemaat-jemaat agar menghargai anugerah kehidupan yang diberikan Allah. Gereja-gereja hanya bisa hidup kalau keluarga-keluarga kristen hidup secara kristen. Saat keluarga-keluarga kristen merosot mutu hidupnya, tak bisa dihindari konsekuensi kemerosotan mutu gereja-gereja sendiri. Dengan menyimak data-data terbaru mengenai penyakit AIDS, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, miras dsb. kita perlu berefleksi bagaimana kaitan iman dengan perbuatan? Apakah kebaktian dan ritus keagamaan kita sungguh menjadi cermin iman atau seremoni?

¹⁹ Lihat Benny Giay, "West Papua: peace zone a possible dream", Jayapura.

²⁰ Salah satu analisis mengenai hubungan agama dan negara di Indoensia dalam millenium ketiga dengan contoh kasus Islam dapat dibaca dalam tulisan Komaruddin Hidayat, "Peran Sosial Agama", dalam: *Indonesia Abad XXI: di tengah kepungan perubahan global*, Jakarta: Kompas, 2000.

**Lampiran 1. Kasus-Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Era Reformasi
Didokumentasikan oleh SKP Keuskupan Jayapura Per Desember 2001**

No.	Kasus	Penanganan secara hukum	Hasil	Keterangan
1.	Peristiwa penembakan Steven Suripatty, 4 Juli 1998	POMDAM VIII/ Trikora	Tidak ada kelanjutan	POMDAM berjanji mengusut tuntas peristiwa penembakan tersebut
2.	Penembakan oleh TNI terhadap pengunjung rasa di Biak, 6 Juli 1998	Investigasi awal Komnas HAM	Tidak ada kelanjutan	Komnas HAM berjanji mengadakan investigasi menyeluruh
3.	Laporan operasi militer pasca pembebasan sandera di Mapnduma, Mei 1996	DPR-RI dan Komnas HAM berjanji menindaklanjuti laporan	Tidak ada	Laporan disusun oleh Els-HAM Irja
4.	Peristiwa kekerasan di Pegunungan Bintang 1999	Pangdam VIII/Trikora mengirim Tim perwira untuk investigasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pergantian personil Polri dan militer, ▪ Permintaan maaf ▪ Perubahan perilaku Polri dan militer 	Hasil ini melegakan masyarakat Pegunungan Bintang
5.	Operasi penurunan bendera Bintang Kejora di Timika, 2 Desember 1999	Kapolda Irja	Tidak jelas	Kapolda berjanji menindak anak buahnya yang menggunakan peluru tajam
6.	Operasi penurunan Bendera Bintang Kejora di Merauke, 16 Februari 2000	Tidak ada	Tidak ada	
7.	Penyerangan polisi terhadap penduduk sipil di Nabire, 28 Februari – 4 Maret 2000	Tidak ada	Tidak ada	
8.	Penembakan polisi dan TNI AL terhadap penduduk sipil di Sorong, 27 Juli 2000	Tidak ada	Tidak ada	
9.	Operasi penurunan Bendera Bintang Kejora di Sorong, 22 Agustus 2000	Tidak ada	Tidak ada	
10.	Operasi penurunan Bendera Bintang Kejora di Wamena, 6 Oktober 2000	Kunjungan Komnas HAM ke Wamena	Tidak ada kelanjutan	Pemda Kab. Jayawijaya mengisolasi wilayah
11.	Penyerangan polisi terhadap penduduk sipil di Merauke, 4 November 2000	Tidak ada	Tidak ada	
12.	Laporan keadaan hak asasi manusia di Paniai, 25 November 2000 kepada Pangdam XVII/ Trikora	Tidak ada	Tidak ada	Laporan ditandatangani oleh Uskup Jayapura, Ketua Sinode GKI, Ketua Sinode GKII
13.	Penangkapan dan penahanan terhadap	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Bebas demi hukum	Empat mahasiswa didampingi oleh tim

	empat mahasiswa Papua pengunjung rasa di Jakarta, 1 Desember 2000			pembela hukum yang tergabung dalam TIVA Papua
14.	Penembakan terhadap penduduk sipil di Merauke, 2 Desember 2000	Tidak ada	Tidak ada	
15.	Operasi penyerangan polisi terhadap penduduk sipil di Abepura, 7 Desember 2000	KPP HAM Papua	Kasus menghadapi bahaya SP3	Berkas berada di Kejaksaan Agung dan belum ada tindak lanjut
16.	Penyerangan oleh Kelompok bersenjata tak dikenal terhadap tiga karyawan PT. Darma Multi Persada di Wasior, Manokwari, 30 Maret 2001	Tidak ada	Tidak ada	Satuan Brimob melakukan operasi pengejaran yang mengakibatkan: 4 orang penduduk sipil ditembak mati, 2 orang luka-luka, dan 16 orang ditahan di Polres Manokwari
17.	Penemuan 4 (empat) jenazah yang mencurigakan di Nabire, Maret-Mei 2001	Tidak ada	Tidak ada	
18.	Penyanderaan dua orang Belgia oleh kelompok TPN/OPM Titus Murib di Ilaga, 7 Juni – 16 Agustus 2001	Mediasi dengan perantaraan Gereja Katolik dan Gereja Kemah Injil dengan jaminan keamanan dari Kapolda Irja	Pembebasan dua sandera secara damai	
19.	Pembunuhan dan perampasan senjata oleh kelompok masyarakat terhadap 5 orang anggota Brimob dan 1 orang karyawan CV. Vatika Papuana Perkasa di Wasior, Manokwari, 13 Juni 2001	Tidak ada	Tidak ada	Operasi penyerangan oleh Satuan Brimob Polda Irja terhadap penduduk di Wasior: penangkapan sewenang-wenang, pembunuhan, penyerangan terhadap penduduk sipil, pembakaran kampung-kampung dengan dalih mengejar pelaku.
20.	Penculikan atas Hubertus Wresman (penduduk Desa Nengke, Kab. Jayapura) oleh kelompok bersenjata dan bertopeng, 25 Juni 2001	<ul style="list-style-type: none"> • Sinode GKI dan ELSHAM Papua mengirim surat pengaduan kepada Komnas HAM • Investigasi gabungan antara Kodam, Polda, Sinode 	Tidak ada Saksi tidak bisa kenali muka pelaku	Ketua Sinode GKI diadakan ke Polda Irja atas tuduhan mencemarkan nama baik Kopassus
21.	Penemuan jenazah Willem Onde dan Yohanes Tumin (pemimpin kelompok TPN/OPM) di Kali Maro, Merauke, 12 September 2001	Tidak ada	Tidak ada	
22.	Perampasan senjata dan pertikaian	Tidak ada	Tidak ada	Operasi gabungan TNI dan Polri yang

	bersenjata antara kelompok TPN/ OPM terhadap TNI/ Polri di Ilaga, Puncak Jaya, 28 September 2001			mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan materiil di pihak penduduk desa.
23.	Penculikan dan Pembunuhan Theys Hiyo Eluay, 10-11 November 2001	Penyidikan Polda, Mabes Polri, TPF Komnas HAM, Puspom TNI, KPN	Sedang berjalan	Keluarga korban, kalangan agama, kalangan LSM, menolak pembentukan KPN dan meminta pembentukan KPP HAM.